

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Diera pemerintahaan sekarang ini banyak sekali terjadi pembaharuan peraturan pemerintah yang sejalan dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah untuk menumbuhkan kesadaran pembangun daerah secara optimal. Hal tersebut berarti pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Sehingga Pemerintah Daerah ditugaskan untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial masyarakat serta diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah tersebut berhasil menjalankan tugas dengan baik atau tidak (Suprpto, 2006). Oleh sebab itu Pemerintah daerah dituntut agar pengelolaan keuangan daerah secara baik yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (*clean government*), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.

Pemerintah Daerah harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah melalui Laporan Keuangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dalam hal ini dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan

kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, apabila informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah memenuhi kriteria karakteristik yang ditetapkan maka pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan, apabila tidak sesuai maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakefisien dan ketidak efektifan (Sukmaningrum 2012).

Laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki haruslah memiliki keempat karakteristik kualitatif diatas sebagai prasyarat normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui, dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas.

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat menjadi acuan untuk menganalisis Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan diantaranya yaitu Pengawasan internal, kapasitas sumber daya manusia,

pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi (dalam Modo, Saerang dan Poputra 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal mendefinisikan Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Selanjutnya faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan adalah kapasitas Sumber Daya manusia. Menurut Zuliatri (2012), Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Pemerintah daerah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang professional dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi dibidangnya dan memiliki jiwa berkompetensi yang sportif. Sumber daya manusia yang professional akan mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara tuntas, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusun laporan keuangan yang berkualitas.

Selanjutnya faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dengan adanya kemunculan Teknologi Informasi (TI) dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan untuk dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan

teknologi telekomunikasi, Kadir dan Triwahwuni, 2013 (dalam djawang 2019). Dengan adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses keuangan pemerintah daerah sehingga dapat menghasilkan keuangan yang andal dan sekaligus tepat waktu serta lebih efektif dan efisien dibandingkan secara manual.

Sistem keuangan di Pemerintah Daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu.

Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan adalah Komitmen Organisasi. Porter et.al (Darmawan, 2013:168) menjelaskan bahwa Komitmen organisasi adalah kuatnya pengenalan dan keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi tertentu Komitmen keberpihakan anggota organisasi terhadap organisasinya serta terlibat aktif dan berkontribusi terhadap organisasinya. Dengan komitmen yang tinggi akan menimbulkan rasa memiliki, sehingga ada keterikatan anggota dengan organisasinya. Apabila Komitmen semakin tinggi terhadap organisasi akan memudahkan pekerjaan yang tersulit sekalipun. Seseorang yang memiliki kemauan yang kuat dan melakukan tanggung jawab untuk menyelesaikan laporan keuangan hal itu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tanpa ada komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan mengurangi kepedulian SDM untuk memberikan hasil yang terbaik terhadap tanggungjawabnya.

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah Kota Kupang. Dimana tugas utama Badan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah Kota Kupang yaitu Membantu Walikota Kupang dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan dan keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Walikota Kupang.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan keuangan, kemudian hasil dari pemeriksaan BPK akan dikeluarkan perolehan pendapat atau opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan. Pemberian perolehan pendapat atau opini oleh BPK dibagi dalam empat perolehan opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak wajar (TW), dan tidak menyatakan Pendapat (TMP/*Disclaimer*). Tujuan dari pemeriksaan tersebut untuk meningkatkan bobot pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Maka berikut ini merupakan data perolehan opini yang diaudit BPK atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang selama 5 (lima) tahun dari tahun 2016-2020.

**Tabel 1.1**

**Perolehan Opini atas LKPD Kota Kupang**

<b>Tahun</b>	<b>Opini atas LKPD Kota Kupang</b>
2016	WDP
2017	WDP
2018	WDP
2019	WTP
2020	WTP

Sumber : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa perolehan Opini atas LKPD Kota Kupang Pada tahun 2015-2018 Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menetapkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan pada tahun 2019-2020 Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menetapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kota Kupang.

Berdasarkan Siaran Pers BPK Perwakilan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015-2020 atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Perolehan Opini Wajar Tanpa

Pengecualian yang diberikan oleh BPK masih ditemukan masalah pemungutan pendapatan retribusi daerah yang belum sepenuhnya dilaksanakan, penatausahaan dan pengelolaan kas belum memadai. Opini Wajar Dengan Pengecualian yang paling banyak ditemukan berkaitan dengan masalah kelemahan pengendalian internal aset tetap yang signifikan atas proses penatausahaan dan penyajian aset tetap, masalah pada investasi permanen khususnya penyertaan modal yang belum didukung dengan laporan keuangan yang telah audit oleh auditor independen, serta masalah pada penerimaan dan pengeluaran dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum disajikan dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan.

Penelitian terdahulu sebelumnya pernah dilakukan oleh Herda Nengsy, dan Sarimauliana (2019) dengan judul penelitian yaitu Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SKPD di Kabupaten Indragiri Hilir). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sumber daya manusia, pengendalian intern, berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Modo, Saerang dan Poputra (2017) dengan judul penelitian yaitu Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengawasan Internal, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Sedangkan Pemahaman tentang Peraturan dan Penggunaan Teknologi

Informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Selanjutnya Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ahmad Basid (2019) dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Variabel komitmen organisasi dan Variabel kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang.**

## **1.2 Masalah penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang.

### **1.3 Persoalan penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka persoalan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah pengawasan internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah kota Kupang?
- b. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah kota Kupang?
- c. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah kota Kupang?
- d. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah kota Kupang?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah kota Kupang.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah kota Kupang
- c. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah kota Kupang
- d. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah kota Kupang.



#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terdiri dari :

a. Manfaat Akademik

Penelitian ini merupakan sumbangsih pemikiran yang dapat diharapkan menjadi sumber bacaan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan berfikir agar dijadikan sebagai salah satu sumber penelitian bagi peneliti berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan Pemerintah Kota Kupang berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu Pengawasan Internal, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi.